

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hubungan internasional abad ke-21 tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi semata. Kekuasaan dalam politik global kini bergerak ke dimensi yang lebih halus, yakni kemampuan negara untuk membentuk persepsi, memengaruhi cara berpikir, dan mengarahkan makna yang dipahami publik lintas batas negara. Dimensi ini sering disebut sebagai kekuatan kognitif atau *cognitive power*, yang bekerja melalui narasi, simbol, dan representasi yang disebarluaskan secara sistematis oleh negara kepada audiens global (Nye, 2023). Dalam konteks ini, media internasional telah berkembang menjadi instrumen strategis kekuasaan negara, bukan sekadar saluran informasi.

Pergeseran ini didorong oleh transformasi ekosistem informasi global yang semakin terdigitalisasi. Platform digital seperti *YouTube*, *Twitter/X*, dan *Facebook* telah mengubah cara aktor internasional menyampaikan pesan kepada publik lintas negara. Media tidak lagi bekerja secara satu arah dari elite ke massa, melainkan melalui jaringan distribusi konten yang mampu menjangkau jutaan audiens secara langsung dan *real-time* (Manor, 2019). Negara-negara dengan ambisi pengaruh global pun berlomba membangun kapasitas media internasionalnya untuk bersaing dalam ruang informasi yang semakin diperebutkan.

Paradigma konstruktivisme dalam hubungan internasional memberikan kerangka yang tepat untuk memahami dinamika ini. Konstruktivisme memandang

realitas politik internasional bukan sebagai sesuatu yang tetap dan objektif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui ide, identitas, norma, dan representasi simbolik. Sebagaimana diargumentasikan oleh Barros (2021), konstruktivisme menekankan bahwa distribusi kekuasaan dan kapabilitas material bukanlah pusat dari politik internasional; sebaliknya, konteks sosial di mana negara-negara berinteraksi satu sama lain merupakan faktor penentu yang membentuk kepentingan dan identitas negara dalam sistem internasional. Negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan material, tetapi juga berdasarkan identitas dan persepsi intersubjektif yang terbentuk dalam interaksi sosial. Dalam kerangka ini, cara sebuah negara direpresentasikan di ruang publik global melalui media, narasi, dan visual berpengaruh langsung terhadap posisi dan pengaruhnya dalam sistem internasional.

Media tidak hanya memengaruhi audiens melalui pesan eksplisit, melainkan juga melalui proses kognitif yang berlangsung di bawah ambang batas kesadaran. Konsep *priming*, *mere exposure*, dan *fluency processing* menunjukkan bahwa pengulangan visual dan narasi tertentu dapat membentuk asosiasi mental dan afinitas emosional tanpa disadari oleh audiens (Zajonc, 1968; Bargh et al., 1996). *Subliminal priming* menggunakan citra figur politik yang mampu membentuk persepsi kejujuran, kreativitas, dan sikap politik secara signifikan bahkan ketika stimulus disajikan di bawah ambang kesadaran (Chun, 2025). Demikian pula, *mere exposure effect* dan *halo effect* dalam konten visual digital terbukti memicu evaluasi positif yang merebak ke domain lainnya, seperti penilaian kualitas dan kepercayaan (Krishnan, 2025). Dalam konteks media internasional milik negara, mekanisme

subliminal ini menjadi semakin relevan mengingat kapasitas produksi visual profesional dan jangkauan distribusi digital yang masif. Media internasional berfungsi sebagai arena produksi makna yang berkontribusi pada pembentukan persepsi, kepentingan, dan identitas negara. Pemilihan isu yang diberitakan, cara isu tersebut dibingkai, serta simbol dan visual yang digunakan dalam pemberitaan secara bersama-sama membentuk kerangka pemahaman audiens terhadap suatu negara. Proses ini dikenal sebagai *agenda setting* dan *framing*, dua mekanisme inti dalam kajian komunikasi politik yang menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi aktif membentuk realitas itu sendiri (McCombs, 2024).

Republik Rakyat China merupakan salah satu aktor global yang secara sistematis dan terencana memanfaatkan media internasional sebagai instrumen kekuasaan non-material. Ekspansi pengaruh China di berbagai kawasan dunia selama dua dekade terakhir membawa serta tantangan reputasi yang signifikan. Narasi mengenai "ancaman China" berkembang seiring dengan meluasnya kehadiran ekonomi, militer, dan diplomatik China di kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan pada 2013, meskipun disambut sebagai peluang pembangunan oleh banyak negara berkembang, juga memicu kekhawatiran mengenai jebakan utang, hilangnya kedaulatan, dan eksploitasi sumber daya (Blanchard & Lu, 2021).

Menghadapi tekanan reputasi yang persisten, China menempuh strategi komunikasi global melalui pengembangan media internasional milik negara. Strategi ini bukan fenomena baru, Amerika Serikat melalui *Voice of America*, Inggris melalui *BBC World Service*, dan Prancis melalui *France 24* telah lebih dulu

memanfaatkan media internasional sebagai instrumen komunikasi strategis media negara. Namun China mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan strategi negara. Investasi besar-besaran dilakukan untuk memperkuat kapasitas media internasional, termasuk *China Global Television Network* (CGTN), *China Radio International* (CRI), dan kantor berita *Xinhua* di berbagai negara (Repnikova, 2022).

China Global Television Network (CGTN) diluncurkan pada 31 Desember 2016 sebagai hasil *rebranding* dan restrukturisasi *CCTV International*. CGTN beroperasi di bawah kendali Departemen Publisitas Partai Komunis China dan memiliki mandat strategis untuk menyampaikan perspektif China kepada audiens internasional dalam skala global. Dengan siaran dalam enam bahasa antara lain Inggris, Spanyol, Prancis, Arab, Rusia, dan Mandarin serta jaringan distribusi yang mencakup lebih dari 160 negara, CGTN memposisikan diri sebagai media internasional utama China yang bersaing langsung dengan CNN, BBC, dan Al Jazeera dalam ruang informasi global (Sun, 2018; Zhu, 2022).

Kehadiran CGTN di platform digital, khususnya *YouTube*, menjadi strategi kunci dalam menjangkau audiens internasional generasi muda yang konsumsi medianya berbasis digital. Saluran *YouTube* resmi CGTN telah mengakumulasi jutaan pelanggan dan tayangan yang mencerminkan jangkauan distribusi konten yang luas. Periode 2023–2025 merepresentasikan fase krusial dalam konsolidasi strategi media digital China yang tidak dapat diabaikan dalam kajian komunikasi internasional kontemporer. Di tengah pergeseran ekosistem media global pasca-pandemi COVID-19, CGTN semakin mengintensifkan distribusi konten melalui

platform digital sebagai respons terhadap perubahan pola konsumsi media internasional yang semakin terkonsentrasi di ruang virtual (Alpermann & Malzer, 2023). Secara simultan, periode ini ditandai oleh eskalasi intensitas komunikasi strategis China terkait kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ekonomi, politik, dan keamanan regional, seiring dengan menguatnya dinamika multipolaritas global. Konvergensi antara transformasi media digital dan intensifikasi agenda geopolitik regional pada rentang waktu tersebut membuka ruang kajian yang signifikan untuk menganalisis secara empiris bagaimana CGTN mengonstruksi agenda politik China di kawasan Asia Tenggara melalui mekanisme representasi visual, narasi, dan pembingkai.

Kawasan Asia Tenggara memiliki posisi yang sangat penting dalam kerangka kebijakan luar negeri dan strategi komunikasi China. Secara geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah China dan menghubungkan China dengan jalur perdagangan maritim global yang strategis. Secara ekonomi, ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar China sejak 2020, menggantikan posisi Uni Eropa, dengan total volume perdagangan yang terus meningkat. Pada 2023, nilai perdagangan China–ASEAN tercatat mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, menjadikan kawasan ini sebagai pasar ekspor sekaligus sumber impor bahan baku yang vital bagi perekonomian China (Wahyuni, 2023; Awan, 2025).

Hubungan ekonomi yang saling ketergantungan ini diperkuat melalui berbagai kerangka kelembagaan. *China–ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)* yang telah berlaku sejak 2010 terus diperdalam melalui negosiasi CAFTA 3.0 yang

mulai diimplementasikan secara bertahap pada periode 2024–2025. Kerangka kerja sama ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, konektivitas digital, serta kolaborasi di bidang ekonomi hijau. Pada saat yang sama, proyek-proyek BRI di Asia Tenggara mulai dari pembangunan jalur kereta cepat di Indonesia dan Laos, pelabuhan di Malaysia dan Myanmar, hingga kawasan industri di Kamboja dan Vietnam mencerminkan kedalaman keterlibatan China dalam pembangunan infrastruktur kawasan (Bharti & Kumari, 2024).

Meskipun demikian, hubungan ekonomi yang kuat tidak serta-merta diikuti oleh kepercayaan politik dan strategis yang setara. *The State of Southeast Asia Survey* yang diterbitkan oleh ISEAS–Yusof Ishak Institute secara konsisten mencatat kesenjangan signifikan antara persepsi kekuatan ekonomi dan kepercayaan strategis terhadap China di kalangan elite dan pembuat kebijakan Asia Tenggara. Survei tahun 2023, 2024, dan 2025 yang melibatkan para akademisi, pejabat pemerintah, dan praktisi di negara-negara ASEAN secara konsisten menempatkan China sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh di kawasan, namun sekaligus sebagai negara yang kurang dipercaya secara strategis (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023; 2024; 2025).

Data survei ISEAS (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2023; ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2024; ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2025) menunjukkan bahwa kekhawatiran strategis terhadap China berpusat pada tiga isu utama. Pertama, perilaku asertif China di Laut China Selatan yang dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam kedaulatan negara-negara pantai, terutama Filipina dan Vietnam. Kedua, kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi berlebihan

(*economic overdependence*) akibat dominasi investasi China dalam infrastruktur dan industri strategis. Ketiga, persepsi bahwa China berupaya menggunakan hubungan ekonomi sebagai instrumen pengaruh politik dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara mitra (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023; 2024; 2025).

Kesenjangan antara kekuatan ekonomi dan kepercayaan strategis ini merepresentasikan defisit *soft power* yang menjadi tantangan nyata bagi agenda politik China di kawasan. Menghadapi situasi tersebut, dalam paradigma konstruktivisme, China tidak hanya dapat mengandalkan instrumen material untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya. Persoalan kepercayaan pada dasarnya bersifat kognitif dan komunikatif menyangkut cara China dipersepsikan, direpresentasikan, dan dipahami oleh publik di kawasan Asia Tenggara (Barros, 2021; Blanchard & Lu, 2021). Dalam logika inilah media internasional menjadi arena strategis bagi China untuk melakukan rekonstruksi narasi dan menegosiasikan citra negaranya di mata publik regional.

Dalam konteks ini, CGTN berfungsi sebagai kanal utama untuk merekonstruksi agenda politik China melalui pengelolaan narasi dan representasi visual. Sebagai media milik negara, CGTN beroperasi dengan mandat untuk membangun *discursive power* kemampuan China untuk memproduksi dan menyebarkan kerangka pemahaman tertentu mengenai peran dan identitasnya di tingkat global (Repnikova, 2022). Konten yang diproduksi dan didistribusikan CGTN bukan merupakan cerminan realitas yang netral, melainkan hasil dari proses seleksi isu, pemingkanaan narasi, dan representasi visual yang mencerminkan kepentingan dan agenda politik negara.

Kajian terhadap konten CGTN yang meliput kawasan Asia Tenggara menunjukkan pola pembingkai yang konsisten. Isu kerja sama ekonomi, pembangunan infrastruktur, konektivitas regional, dan stabilitas kawasan secara sistematis ditonjolkan sebagai tema utama pemberitaan. Sebaliknya, isu yang berpotensi menampilkan China dalam citra negatif, seperti sengketa Laut China Selatan, ketegangan perbatasan, atau kasus pelanggaran hak buruh dalam proyek BRI cenderung diminimalkan, dibingkai secara normatif, atau ditempatkan dalam konteks dialog dan multilateralisme (Fong et al., 2020; Khoirunnisa, 2022). Pola ini mencerminkan upaya sistematis untuk mengelola agenda dan membangun citra China sebagai aktor yang konstruktif, kooperatif, dan berorientasi pada kemajuan bersama di kawasan.

Dimensi visual memainkan peran yang tidak kalah penting dalam proses konstruksi agenda ini. Kerangka *Visual Global Politics* yang dikembangkan oleh Bleiker (Bleiker, 2018) (2018) menegaskan bahwa visual bukan sekadar pelengkap narasi teks, melainkan memiliki kekuatan tersendiri dalam membentuk makna politik. Visual bekerja melalui jalur emosional dan estetis yang sering kali melampaui kesadaran kritis audiens menghasilkan asosiasi, kesan, dan identifikasi tertentu terhadap objek atau aktor yang ditampilkan. Melalui mekanisme yang disebut *visuality as power*, pengulangan visual tertentu secara konsisten dalam konten media dapat menormalisasi sebuah agenda politik dan mengarahkan persepsi audiens secara gradual namun efektif.

Dalam konteks CGTN, representasi visual infrastruktur mega proyek BRI, suasana pertemuan diplomatik yang hangat antara pejabat China dan pemimpin

Asia Tenggara, serta aktivitas masyarakat yang menggambarkan kemajuan dan harmoni sosial secara bersama-sama membangun kerangka visual yang merepresentasikan China sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan. Gabungan narasi verbal dan representasi visual ini menciptakan apa yang disebut Bleiker (Bleiker, 2018) sebagai *frames of possibility* batas-batas kerangka berpikir yang membatasi cara audiens menginterpretasikan realitas politik tertentu (Bleiker, 2018).

Penelitian yang telah ada mengenai media internasional China umumnya masih bersifat parsial baik dalam hal cakupan isu, platform analisis, maupun kawasan kajian. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji CGTN dari perspektif kualitatif, seperti analisis wacana, studi kasus tunggal, atau kajian *framing* berbasis teks (Zhu, 2022; Mattingly & Sundquist, 2023). Kajian yang secara simultan menganalisis narasi verbal dan representasi visual CGTN dalam konteks spesifik Asia Tenggara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif masih sangat terbatas dalam literatur yang ada.

Kekosongan ini menciptakan ruang kajian yang penting untuk diisi. Pendekatan kuantitatif melalui analisis isi (*content analysis*) memungkinkan identifikasi pola dan kecenderungan secara sistematis dari sejumlah besar konten media dalam rentang waktu tertentu sesuatu yang sulit dicapai melalui analisis kualitatif konvensional. Dengan menganalisis konten CGTN secara kuantitatif selama periode 2023–2025, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran empiris yang lebih komprehensif dan terukur mengenai strategi konstruksi agenda politik China melalui media internasional di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga negara sebagai representasi respons kawasan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan variasi posisi geopolitik dan pola respons terhadap China yang berbeda. Indonesia dan Malaysia menempuh pendekatan pragmatis yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kehati-hatian strategis, sementara Filipina menunjukkan tingkat skeptisisme yang lebih tinggi akibat pengalaman langsung konflik maritim di Laut China Selatan (Seah & Tan, 2025). Variasi ini memberikan konteks komparatif yang kaya untuk memahami bagaimana CGTN mengadaptasi narasi dan visualnya dalam menyasar berbagai segmen audiens di kawasan.

Selain dimensi eksternal, penelitian ini juga memasukkan analisis persepsi publik domestik China terhadap CGTN sebagai elemen pelengkap. CGTN tidak hanya berfungsi sebagai media untuk audiens internasional, tetapi juga sebagai representasi citra global China yang dikonsumsi oleh publik domestik. Memahami bagaimana masyarakat China sendiri memandang CGTN memberikan perspektif tambahan mengenai konsistensi dan efektivitas konstruksi agenda media milik negara baik ke luar maupun ke dalam (Yu & Shao, 2025).

Pemilihan periode 2023–2025 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Rentang waktu ini merepresentasikan fase konsolidasi strategi media digital China setelah periode pandemi yang turut menggeser konsumsi konten ke platform digital. Pada periode ini, intensitas persaingan geopolitik di Indo-Pasifik semakin meningkat, implementasi CAFTA 3.0 mulai berjalan, dan pola konsumsi informasi politik di Asia Tenggara semakin terkonsentrasi di platform video digital (Grecu et

al., 2025). Data keterlibatan audiens berupa jumlah tayangan, tanda suka, dan komentar yang tersedia secara terbuka pada platform *YouTube* menjadikan periode ini dapat dikaji secara kuantitatif dengan tingkat presisi yang memadai.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat urgensi akademis yang kuat untuk mengkaji secara sistematis bagaimana CGTN mengonstruksi agenda politik China melalui pola narasi dan representasi visual dalam kontennya yang meliputi kawasan Asia Tenggara pada periode 2023–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi kajian hubungan internasional yang menempatkan media, visual, dan kekuasaan sebagai tiga elemen yang saling terkait dalam memahami dinamika pengaruh China di Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pola narasi teks, representasi visual, dan valensi pembingkai dalam konten CGTN yang meliputi kawasan Asia Tenggara periode 2023–2025, serta mengukur tingkat keselarasan narasi-visual, korelasi dengan interaksi audiens digital, dan konsistensi agenda media internasional CGTN dengan dokumen resmi pemerintah China.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana China Global Television Network (CGTN) mengonstruksi agenda politik China di kawasan Asia Tenggara melalui pola narasi teks, representasi visual, dan valensi pembingkai dalam kontennya pada periode 2023–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola narasi teks, representasi visual, dan valensi pembingkai dalam kontennya yang digunakan *China Global Television Network* (CGTN) dalam mengkonstruksi agenda politik China di kawasan Asia Tenggara pada periode 2023-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya di bidang studi media internasional dan konstruksi agenda politik. Secara spesifik, penelitian ini memperkaya penerapan kerangka *Visual Global Politics* dalam menganalisis media milik negara sebagai instrumen komunikasi politik di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang mengkaji dimensi visual dalam instrumen media internasional dan komunikasi internasional negara-negara besar.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap konten media internasional, khususnya dalam penerapan pendekatan kuantitatif dan analisis visual dalam mengkaji strategi komunikasi politik China.

b. Bagi Akademisi dan Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam memahami peran media internasional negara sebagai instrumen pembentukan agenda dan persepsi publik di kawasan Asia Tenggara, serta mendorong kajian empiris lebih lanjut mengenai efektivitas komunikasi strategi media China di era digital.

c. Bagi Pemangku Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, kementerian luar negeri, dan lembaga kajian strategis terutama di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan komunikasi dan diplomasi publik yang responsif terhadap pengaruh media internasional China di kawasan Asia Tenggara.

